



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018. Ini merupakan tahun kedua periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016-2021 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam Sistem Perencanaan Daerah karena Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perencanaan pada unit



organisasi terkecil dan terendah di Pemerintahan Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra (Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2018, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu pada Tahun 2018. Rencana Kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Pada dasarnya Renja OPD berisi tentang Kebijakan Umum OPD dan Program/kegiatan Pembangunan di lingkungan OPD baik yang dilaksanakan oleh OPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun oleh setiap OPD dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh



Bappeda. Renja OPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana kinerja OPD memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategis, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Sejalan dengan UU NO. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Teknokrasi (Strategis), sesuai dengan fungsinya sebagai menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD.
2. Demokratis dan Partisipatif, penyusunan Renja OPD perlu dilaksanakan secara Efektif, Efisien, transparansi, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
3. Politis, bahwa penyusunan Renja OPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.



4. Perencanaan Bottom-up, bahwa penyusunan Renja OPD perlu untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
5. Perencanaan Top Down, bahwa proses penyusunan Renja OPD perlu sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RKPD dan RPJMD. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja OPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja OPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang).
6. Perencanaan Top Down, bahwa proses penyusunan Renja OPD perlu sinergi dan Berkaitan dengan Program dan Kegiatan Kabupaten/kota serta tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD tahun berjalan .

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta sumber pendanaannya yang disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Kepala Badan Penduduk dan keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);





25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 2);
26. Peraturan gubernur Bengkulu Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2018 adalah untuk menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Provinsi Bengkulu dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ini secara umum adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan dalam pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan aktivitas dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Sehingga diharapkan ada sinkronisasi antara *aktivitas* dan *target pembangunan* dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:



1. Mewujudkan Konsistensi dan Sinkronisasi Perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
2. Menjadikan rencana Kerja sebagai acuan dalam Perencanaan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkuluserta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan Pengertian ringkas tentang Renja –OPD, Proses penyusunan Renja –OPD keterkaitan antara Renja –OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra- OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, Serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, Serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan poko bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah, serta susunan garis besar Isi dokumen.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-OPDTahun lalu dan capaian Renstra-OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja –OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA-OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan Kajian Capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sejaumana tingkay kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap VIsi dan Misi Kepala Daerah terhadap caaian Program dan Kegiatan tantangan dana peuanag dalam meningkatkan pelayanan OPD

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program /Kegiatan yang diusulkan para pemangku Kepentingan baik dari kelompok msy, LSM asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan proiritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target RENSTRA-OPD

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan, Penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/Kegiatan, Pagu Indikatif, Maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3APP&KB TAHUN 2016**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra DP3APP & KB**

Evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses perencanaan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana Satuan kinerja perangkat daerah SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menjadi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP & KB). Melalui evaluasi dapat diidentifikasi sejauh mana proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi inilah yang hendaknya merupakan titik tolak perencanaan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan di masa mendatang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 telah menetapkan indikator keberhasilan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 5 tahun (2016-2021). Renstra tersebut menjadi panduan pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Muara dari pembangunan Provinsi Bengkulu dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya mengarah pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu yang didasarkan pada 3



komponen yaitu Pendidikan, Daya Beli dan Kesehatan. Sehingga evaluasi yang dilakukan idealnya merupakan evaluasi yang terkait dengan faktor pendukung dari ketiga komponen tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dilakukan setelah selesai tahun berjalan (2017), hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi RENJA 2017, pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ditunjang oleh Belanja tidak langsung (Rp. 5.54.401.291,00) yang digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung (Rp. 4.516.104.000,00) yang terbagi menjadi urusan rutin yang merupakan kegiatan yang melekat dan urusan Program pembangunan, dapat dilihat pada **tabel 2.1 (terlampir)**.



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA-OPD dan  
Pencapaian RENSTRA-OPD Sampai dengan Tahun 2017  
Provinsi Bengkulu

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Ketahanan Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016			Target Program dan kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10-4)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir	2500 Surat	1 Tahun	2500 Surat	2500 Surat	100	2500 Surat	2500 Surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrator keuangan	12 Orang	1 Tahun	14 Orang	14 Orang	100	12 Orang	12 Orang	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang mampu dipenuhi	24 Jenis	1 Tahun	24 Jenis	24 Jenis	100	24 Jenis	24 Jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dokumen yang mampu dicetak dan digandakan	5 Jenis	1 Tahun	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mampu disediakan	20 jenis	1 Tahun	8 jenis	8 jenis	100	20 jenis	20 jenis	100



7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang mampu disediakan	30 jenis	1 Tahun	10 jenis	10 jenis	100	30 jenis	30 jenis	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang mampu disediakan	5 Jenis	1 Tahun	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100
9	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	50 OK	1 Tahun	50 OK	50 OK	100	50 OK	50 OK	100
10	Penata usahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah	Jumlah pengelola barang milik daerah dan pengelola sistem akutansi kerja perangkat daerah (SKPD)	4 Orang	-	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang	4 Orang	100
11	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jenis jasa publikasi	11 Orang	-	11 Orang	11 Orang	100	11 Orang	11 Orang	100
12	Penyediaan jasa publikasi	Jumlah tenaga honorer (tidak tetap) yang disediakan untuk membantu administrasi dan teknis perkantoran	2 media	-	2 media	2 media	100	2 media	2 media	100
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mampu disediakan	9 unit	-	9 Unit	9 Unit	100	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu disediakan	9 Unit	1 Paket	16 Unit	16 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100
3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu dirawat	20 Unit	-	22 Unit	22 Unit	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mampu dirawat	5 unit	1 Paket	5 unit	5 unit	100	12 Bulan	12 Bulan	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ pagar/ taman/ tempat parkir dan halaman	1 unit	1 Paket	1 unit	1 unit	100	1 Paket	1 Paket	100
6	Rehabilitasi Sedang/berat Mushola	Perluasan mushola/ tempat ibadah yang baik dan bersih	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	-
7	Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/ air minum	Jumlah Konstruksi jaringan air bersih/ air minum	-	-	1 unit	1 unit	100	-	-	-
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara menunjang operasional kantor	26 Unit	-	-	-	-	60 Unit	60 Unit	100
9	Pengadaan instalasi listrik kantor	Jumlah instalasi listrik kantor/ Mushola	-	-	1 unit	1 unit	100	-	-	-





<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>										
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/pendidikan lainnya	20 Orang	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	100
2	Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	9 Orang	-	-	-	-			
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
1	Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen RENJA, RKA, DPA dan TEPPA, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKJ, RKPD SKPD dll	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	14 Dokumen	14 Dokumen	100
2	Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi Bengkulu	Jumlah Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi Bengkulu	2 Pertemuan		2 Pertemuan	2 Pertemuan	99	2 Pertemuan	2 Pertemuan	100
3	Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	Jumlah orang mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	70 orang	-	30 orang	30 orang	100	-	-	-
<b>Program keluarga Berencana</b>										
1	Penyuluhan dan edukasi peserta ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia kurang dari 21 tahun	Jumlah penyuluhan Peningkatan pengetahuan tentang KB	5 Penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi pencegahan pernikahan dini tingkat SLTP dan SLTA	Menurunnya angka pernikahan dini pada usia sekolah serta meningkatnya kualitas anak	3 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>										
1	Penyuluhan kesehatan sistem reproduksi perempuan	Jumlah Penyuluhan kesehatan sistem reproduksi perempuan	40 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-



3	Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	4 Penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>										
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	Jumlah Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	2 Kab/kota	-	-	-	-	-	-	-
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah	Jumlah forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah	2 Kab/kota	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>										
1	sosialisasi peraturan perundang-undangan PUG	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perda PUG	1 Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	Jumlah orang mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	70 orang	-	30 orang	30 orang	100	-	-	-
3	Pembuatan PERDA perlindungan anak	Jumlah peraturan daerah sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak anak	1 Perda	-	-	-	-	-	-	-
4	Optimalisasi gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA) dalam peningkatan pendidikan anak	Jumlah anak asuh	20 anak asuh	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengembangan model ( <i>prototype</i> ) pemenuhan hak anak dan pelaksanaannya	Jumlah model pengembangan ( <i>prototype</i> ) pemenuhan hak anak yang disusun dan dilaksanakan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
6	Seminar perlindungan bagi ABK dan pemenuhan hak sipil anak	Jumlah seminar perlindungan terhadap ABK dan meningkatnya pemahaman tentang hak sipil anak	10 kab/kota	-	-	-	-	-	-	-



7	Fasilitasi upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan pornografi di sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi pemahaman bagi siswa di sekolah tentang bagaimana upaya melindungi diri	10 kab/kota	-	-	-	-	-	-	-
8	Fasilitasi upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan pornografi di sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi pemahaman bagi siswa di sekolah tentang bagaimana upaya melindungi diri	10 kab/kota	-	-	-	-	-	-	-
9	Penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga P2TPA	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	-	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	100	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	100
10	Pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilatih	2 Pelatihan	-	1 pelatihan	1 pelatihan	-	-	-	-
11	TOT peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah orang TOT peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	37 Orang	-	30 Orang	30 Orang	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>										
1	Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak	Jumlah dokumen mengenai profil gender dan anak	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	100
2	Peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang ekonomi	Jumlah SDM perempuan yang mengikuti pelatihan bidang ekonomi	50 orang	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan koperasi perempuan	Jumlah koperasi perempuan yang dibina	10 koperasi	-	-	-	-	-	-	-
4	Rapat koordinasi teknis forum Gender dan anak seProvinsi Bengkulu	Rencana aksi forum data	4 Rakor	-	-	-	-	-	-	-



5	Fasilitasi pembentukan <i>Focal point</i> Kabupaten dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kab/Kota	Terbentuknya <i>Focal point</i> di 10 Kab/Kota dan meningkatnya kapasitas Pokja PUG	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100
6	Pembekalan Kader BKL/BKB/BKR	Peningkatan SDM Kader BKL/BKB/BKR	30 Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
7	Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif	Jumlah Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif	1 Jambore	-	-	-	-	-	-	-
8	Peringatan hari besar perempuan dan anak	Hari Kartini, Hari Ibu, Hari anti kekerasan terhadap perempuan dan hari anak nasional	4 event	1 event	1 event	1 event	100	4 event	4 event	100
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan</b>										
1	Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan se-Provinsi Bengkulu	Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan se-Provinsi Bengkulu	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98
2	Fasilitasi BKOW prov. Bengkulu	Terlaksananya fasilitasi BKOW prov. Bengkulu	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	100
3	Fasilitasi GNOTA prov. Bengkulu	Terlaksananya fasilitasi GNOTA prov. Bengkulu	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98	-	1 Kegiatan	96
4	Fasilitasi Dharma wanita prov Bengkulu	Terlaksananya fasilitasi Dharma wanita prov Bengkulu	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96
5	Fasilitasi Dharma wanita setda Provinsi Bengkulu	Terlaksananya fasilitasi dharma wanita setda Provinsi Bengkulu	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Peningkatan <i>Home Industry</i> Perempuan	Jumlah <i>Home Industry</i> Perempuan yang dibina dan dikembangkan	15 home industry	-	-	-	-	-	-	-
7	Advokasi Program CSR bagi kelompok usaha ekonomi perempuan binaan	Jumlah perusahaan yang menyalurkan CSR pada kelompok usaha ekonomi perempuan binaan	10 kab/kota	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengembangan sistem permodalan alternatif bagi Kelompok Usaha Perempuan dengan Lembaga Keuangan	Jumlah Lembaga Keuangan yang memberikan bantuan modal kepada Kelompok Usaha Perempuan	6 MoU lembaga keuangan	-	-	-	-	-	-	-
9	Pembinaan dan pelatihan kelompok ekonomi perempuan berbasis potensi lokal	Jumlah PKL ekonomi perempuan berbasis potensi lokal	150 Pedagang	-	-	-	-	-	-	-



10	Pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan perlindungan PPA dari tindak kekerasan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan kekerasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
11	Pembentukan satgas perlindungan anak (Pembentukan Kader/Aktifis Pengembangan Penyelenggara PATBM)	Jumlah desa/ Kel koordinasi antar SKPD, lembaga layanan, pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan adanya bantuan stimulan	2 kab/kota	-	-	-	-	Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu	
12	Peningkatan kapasitas penguatan SDM pengelola LKSK dan panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak	Peningkatan SDM LKSK dan panti asuhan ramah anak	3 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD DP3APP & KB

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan. Dengan mengacu pada prinsip *Good Governance*, *Clean Governance* dan Mengarah *Ke Open Governance*, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja kunci sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan OPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mempunyai indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan OPD.

Hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pelaksanaan pelayanan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah berjalan cukup baik sesuai target yang ditetapkan sebagaimana **table 2.2 (terlampir)**.



Tabel 2.2												
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Ketahanan Penduduk dan Keluarga Berencana												
Provinsi Bengkulu												
No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target RENSTRA-SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan penduduk (%)	Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat;	Prevalensi KB aktif	1,69	1,55	1,50	1,45	1,69	1,55	1,50	1,45	Target pada renstra disusun berdasarkan asumsi peningkatan kinerja per tahun
2	Persentase Rasio Akseptor KB	Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat;	Persentase kematian ibu melahirkan	68	68-69	69-70	70-71	68	68-69	69-70	70-71	
3	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat;	Persentase cakupan ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	45,10-41,57	41,57-38,31	38,31-35,31	35,31-32,55	45,10-41,57	41,57-38,31	38,31-35,31	35,31-32,55	
4	Indeks pembangunan gender (IPG)		Persentase guru sertifikasi menurut jenis kelamin dan	91,02-91,52	91,52-92,02	92,02-92,52	92,52-93,02	91,02-91,52	91,52-92,02	92,02-92,52	92,52-93,02	
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Persentase pekerja informal menurut jenis kelamin di Provinsi Bengkulu	68,76-69,26	69,26-69,76	69,76-70,26	70,26-73,06	68,76-69,26	69,26-69,76	69,76-70,26	70,26-73,06	
6	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;	Persentase perempuan dan laki-laki yang duduk di lembaga eksekutif, yudikatif, Legislatif Hakim, Partai politik,	30%-50%	10% - 20%	20%-30%	30%-40%	30%-50%	10% - 20%	20%-30%	30%-40%	
7	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)			425-400	400-375	375-350	350-325	425-400	400-375	375-350	350-325	



### **2.3. Isu – isu strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD DP3APP & KB**

Sebagai salah satu OPD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Setelah mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD dan mensinergikan Visi Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Visi dan Misi Kementerian lembaga, maka ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas DP3A & PP KB yakni : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal; dan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) isu strategis yaitu 1) Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak; 2) Meningkatnya layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan 3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja.

Walaupun IPM merupakan ukuran kualitas SDM, kualitas hidup perempuan juga ditentukan oleh ada tidaknya masalah lain yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi IPM. Kekerasan terhadap perempuan didominasi kekerasan oleh KDRT terhadap perempuan pada tahun 2015 : 31,45 % adalah kasus KDRT/ KTI pada kelompok umur >18 tahun yang berpendidikan SMA sederajat dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang dilakukan oleh suami / mantan suami dan didominasi terjadi di daerah perkotaan. Hal ini terjadi akibat tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dan pemahaman nilai agama yang relatif kurang.





Jumlah anak yang bermasalah hukum dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pada tahun 2014 (130 orang). Hal ini antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan pelaku yang rendah, masalah ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan lingkungan pergaulan yang baik.

Rendahnya persentase perempuan di jabatan strategis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kemampuan perempuan untuk duduk sejajar dengan laki-laki belum mampu berkompetisi, kebijakan yang kurang berpihak terhadap perempuan, adanya budaya patriarkhi serta komitmen perempuan itu sendiri masih rendah terhadap tuntutan keadilan gender.

Kualitas hidup perempuan menjadi penting untuk dibahas, mengingat bahwa kualitas hidup perempuan sangat menentukan kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu kondisi pendidikan dan kesehatan perempuan memiliki arti yang sangat penting dalam membangun dan meningkatkan kualitas perempuan.

Penyakit HIV AIDS pada perempuan di Provinsi Bengkulu juga mengalami peningkatan, semakin banyaknya pengguna narkoba pada kalangan remaja dan adanya pelaku sex bebas pada heteroseksual menyebabkan makin tingginya penyebaran HIV AIDS.

Kasus perceraian dan PHK juga menjadi pemicu meningkatnya jumlah wanita rawan sosial ekonomi, selain itu kondisi geografis Bengkulu mengakibatkan sering terjadinya gempa, ancaman tsunami, longsor dan banjir juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan penguatan bagi keluarga agar lebih siap menghadapi bencana tersebut.

Program Pengendalian Penduduk dan KB menuntut penyerasian kebijakan diberbagai sisi baik infrastruktur, personil dan sarana prasarana, untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan ke daerah.



Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
- b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
- c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
- d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pengumpulan informasi usulan dari setiap Kab/Kota melalui Rakor Pembangunan merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan dan pengembangan yang diharapkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Peran serta masyarakat



nantinya, diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Selain dari forum tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu juga menerima masukan-masukan dan usulan yang berasal dari instansi terkait lainnya.

Pada Tahun 2017, usulan-usulan yang telah diinventarisir tersebut akan diakomodir dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Setelah menelaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu maka arah kebijakan yang diambil adalah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan ketahanan keluarga dan keluarga berencana. Namun untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain permasalahan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai terutama dalam hal pendampingan dan konsultasi korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Tujuan dari pembangunan Pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi di Provinsi Bengkulu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal, .

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut ditandai dengan :



1. Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
2. Terwujudnya 10 kab/kota yang responsif gender dan peduli anak
3. Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Banyaknya Masyarakat yang sudah menggunakan KB (Rasio Akseptor KB)
5. Remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan

Sasaran Renja tahun 2018 Meningkatkan akses dan Kualitas pelayanan Pengendalian penduduk Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja, Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak dan meningkatnya layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan :

1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan
2. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan
3. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak
4. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak.
5. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
6. Penggunaan KB Aktif baik Perempuan dan laki-laki
7. Pengendalian Remaja Perempuan 15-19 tahun yang melahirkan
8. Meningkatnya ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat di Tingkat Provinsi, Kab/kota.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Hal ini dapat dilihat pada **tabel 3.3 (terlampir)**.



Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018  
dan Prakiraan Maju Tahun 2019  
Provinsi Bengkulu

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Ketahanan Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	LOKASI	Rencana Tahun 2018 ( Rp.000)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2019 ( Rp.000)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Ketahanan Penduduk dan Keluarga Berencana								
					11.590.582				12.152.259
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah, jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Provinsi Bengkulu	13 Jenis Kegiatan	1.222.076	APBD		13 Jenis Kegiatan	1.341.104
1	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir	Provinsi Bengkulu	2550 Surat	50.160	APBD		2700 Surat	55.176
2	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Bengkulu	12 Bulan	109.230,00	APBD		12 Bulan	120.153
3	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrator keuangan	Provinsi Bengkulu	20 Orang	160.116	APBD		20 Orang	176.128
4	- Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang mampu dipenuhi	Provinsi Bengkulu	30 Jenis	97.500	APBD		35 Jenis	107.250
5	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dokumen yang mampu dicetak dan digandakan	Provinsi Bengkulu	60 Jenis	82.500	APBD		70 Jenis	90.750
6	- Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mampu disediakan	Provinsi Bengkulu	10 jenis	27.500	APBD		15 jenis	30.250
7	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang mampu disediakan	Provinsi Bengkulu	35 jenis	68.200	APBD		40 jenis	75.020



8	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang mampu disediakan	Provinsi Bengkulu	5 Jenis	42.350	APBD		5 Jenis	46.585
9	- Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Provinsi Bengkulu	30 OK	250.000	APBD		35 OK	275.000
10	- Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah	Jumlah pengelola barang milik daerah dan pengelola sistem akuntansi kerja perangkat daerah (SKPD)	Provinsi Bengkulu	4 Orang	20.000	APBD		4 Orang	22.000
11	- Penyediaan jasa publikasi	Jenis jasa publikasi	Provinsi Bengkulu	2 media	22.000	APBD		2 media	24.200
12	- Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah pengelola barang milik daerah	Provinsi Bengkulu	12 Bulan	60.720	APBD		12 Bulan	66.792
13	- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer (tidak tetap) yang disediakan untuk membantu administrasi dan teknis perkantoran	Provinsi Bengkulu	11 Orang	231.800	APBD		11 Orang	251.800
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dibangun/ direhab/ dipelihara</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>100 Unit</b>	<b>922.871</b>	<b>APBD</b>		<b>122 Unit</b>	<b>949.711</b>
1	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mampu disediakan	Provinsi Bengkulu	11 Unit	90.000	APBD		15 unit	110.000



2	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu disediakan	Provinsi Bengkulu	9 Unit	90.000	APBD		15 Unit	100.000
3	- Pengadaan Meubeleur	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu dirawat	Provinsi Bengkulu	20 Unit	90.000	APBD		22 Unit	110.000
4	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mampu dirawat	Provinsi Bengkulu	8 unit	152.470	APBD		8 unit	172.470
5	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ pagar/ taman/ tempat parkir dan halaman	Provinsi Bengkulu	1 unit	258.401	APBD		1 unit	284.241
6	- Rehabilitasi mushola kantor	Perluasan mushola/ tempat ibadah yang baik dan bersih	Provinsi Bengkulu	1 unit	154.000	APBD			
7	Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/ air minum	Jumlah Konstruksi jaringan air bersih/ air minum	Provinsi Bengkulu		-	APBD			-
8	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara menunjang operasional kantor	Provinsi Bengkulu	50 Unit	88.000	APBD		60 Unit	98.000
9	- Pengadaan instalasi listrik kantor	Jumlah instalasi listrik kantor/ Mushola	Provinsi Bengkulu		-	APBD		1 unit	75.000
						APBD			
	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>20 Orang</b>	<b>30.000</b>	<b>APBD</b>		<b>33 Orang</b>	<b>55.000</b>
1	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/pendidikan lainnya	Provinsi Bengkulu	20 Orang	30.000	APBD		33 Orang	55.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan</b>	<b>642.597</b>	<b>APBD</b>		<b>13 Dokumen dan 2 Kali Pertemuan</b>	<b>716.857</b>
1	- Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen RENJA, RKA, DPA dan TEPPA, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKPI, RKPJ, RKPJ SKPD dll	Provinsi Bengkulu	12 Dokumen	82.597	APBD		12 Dokumen	90.857
2	- Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi Bengkulu	Jumlah Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu	2 Pertemuan	270.000	APBD		2 Pertemuan	297.000
3	- Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB	Jumlah Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Provinsi Bengkulu	1 Dokumen	190.000	APBD		1 Dokumen	219.000





4	- Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	Jumlah orang mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk SDM Perencana	Provinsi Bengkulu	70 orang	100.000	APBD		80 orang	110.000
<b>Program keluarga Berencana</b>					<b>560.208</b>	<b>APBD</b>			<b>383.227</b>
1	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian dan kependudukan dan KB	Jumlah laporan program pengendalian dan kependudukan dan KB	Kab/Kota	1 Laporan	180.208	APBD		1 Laporan	198.228
2	- Pembentukan kelompok Masyarakat peduli KB	Jumlah kelompok Masyarakat peduli KB yang dibentuk	Kab/Kota	7 Kelompok	180.000	APBD			
3	- Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah orang yang ditingkatkan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Kab/Kota			APBD		40 Orang	184.999
4	- Penyuluhan dan edukasi peserta ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia kurang dari 21 tahun	Jumlah penyuluhan Peningkatan pengetahuan tentang KB	Kab/Kota	2 Penyuluhan	200.000	APBD			
5	- Sosialisasi pencegahan pernikahan dini tingkat SLTP dan SLTA	Menurunnya angka pernikahan dini pada usia sekolah serta meningkatnya kualitas anak	Kab/Kota			APBD			
<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>					<b>847.500</b>	<b>APBD</b>			<b>911.906</b>
1	- Penyuluhan, edukasi dan advokasi dalam rangka kependudukan dan ketahanan keluarga	Jumlah Penyuluhan, edukasi dan advokasi dalam rangka kependudukan dan ketahanan keluarga	Kab/Kota	8 Pertemuan	247.500	APBD		8 Pertemuan	272.250
2	- Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Kab/Kota	2 Kab/Kota	200.000	APBD		2 Kab/Kota	220.000
3	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KMP) yang bersal dari Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat desa yang yang di bentuk (motivator Ketahanan Keluarga)	Kab/Kota	2 Kab/Kota	150.000	APBD		2 Kab/Kota	165.000
4	- Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	Jumlah Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	Kab/Kota	2 Kab/kota	250.000	APBD		2 Kab/kota	220.000



5	- Pembentukan forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah	Jumlah forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja diluar sekolah	Kab/Kota			APBD		1 Kab/kota	34.656
<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>					250.000	APBD			275.000
1	- Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir	Jumlah Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir pantai	Kab/Kota	7 Kab/ Kota	250.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	7 Kab/ Kota	275.000
<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>		<b>Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)</b>		<b>38,31- 35,31</b>	<b>250.000</b>	<b>APBD</b>			<b>110.000</b>
1	- Penyuluhan kesehatan sistem reproduksi perempuan	Jumlah Penyuluhan kesehatan sistem reproduksi perempuan	Kab/Kota		-	APBD			
2	- Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab/Kota	4 Kegiatan	100.000	APBD		4 Kegiatan	110.000
3	- Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kab/Kota	4 Penyuluhan	150.000	APBD			
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>					<b>1.100.000</b>	<b>APBD</b>			<b>835.000</b>
1	- Perumusan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Penelitian Yang di Hasilkan	Kab/Kota	1 Dokumen	100.000	APBD			
2	- Sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perda PUG	Kab/Kota	1 Sosialisasi	100.000	APBD			-
3	- Pembuatan PERDA yang berkaitan dengan PP dan PA	Jumlah peraturan daerah sebagai payung hukum Kegiatan PP dan PA	Kab/Kota	1 Perda	200.000	APBD		-	-
4	- Pengembangan model (prototype) pemenuhan hak anak dan pelaksanaannya	Jumlah model pengembangan (prototype) pemenuhan hak anak yang disusun dan dilaksanakan	Kab/Kota	1 kegiatan	50.000	APBD		1 kegiatan	75.000



5	- Seminar perlindungan bagi ABK dan pemenuhan hak sipil anak	Jumlah seminar perlindungan terhadap ABK dan meningkatnya pemahaman tentang hak sipil anak	Kab/Kota	10 kab/kota	100.000	APBD		10 kab/kota	125.000
6	- Peningkatan kapasitas penguatan SDM pengelola LKSK dan panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak	Peningkatan SDM LKSK dan panti asuhan ramah anak	Kab/Kota	10 kab/kota	100.000	APBD		10 kab/kota	125.000
7	- Penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga P2TPA	Kab/Kota	1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	200.000	APBD		1 Lembaga provinsi dan 10 kab/kota	225.000
8	- Pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah pelatihan pendamping Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilatih	Kab/Kota	2 Pelatihan	100.000	APBD		3 Pelatihan	125.000
9	- TOT (Teraing of Trainer) peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah orang TOT peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Kab/Kota	37 Orang	150.000	APBD		39 Orang	160.000
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>					<b>1.929.683</b>	<b>APBD</b>			<b>2.260.242</b>
1	- Peningkatan Kesehatan perempuan lansia (lanjut usia)	Jumlah perempuan Lansia yang diawasi kesehatannya secara berkala	Kab/Kota	10 Kab/ Kota	250.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	10 Kab/ Kota	285.000
2	- Pembentukan kampung 'he for she'	Jumlah Kab/ Kota yang dibentuk dan dibina kampung he for she	Kab/Kota	2 kab/kota	306.527	APBD		2 kab/kota	337.180
3	- Pembuatan aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah aplikasi aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Kab/Kota	1 aplikasi	150.000	APBD		1 aplikasi	90.000



4	- Penilaian dan pengiriman pelaksanaan program pemberdayaan perempuan	Jumlah orang pengiriman dan penilaian program pemberdayaan perempuan di Kab/ Kota	Kab/Kota	10 Kab/ Kota	147.000	APBD		10 Kab/ Kota	294.000
5	- Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di lembaga masyarakat, dunia usaha dan media	Jumlah orang mengikuti Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di lembaga masyarakat, dunia usaha dan media	Kab/Kota	70 orang	150.000	APBD		70 orang	165.000
6	- Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di Setiap Bidang Pembangunan	Jumlah kegiatan Penguatan dan evaluasi pelaksanaan PUG	Kab/Kota	1 Kegiatan	150.000	APBD		1 Kegiatan	175.000
7	- Penguatan, pendidikan dan partisipasi perempuan dalam jabatan publik	Jumlah perempuan kader parpol yang ditingkatkan kapasitas dalam politik	Kab/Kota	60 Orang	100.000	APBD		60 Orang	125.000
8	- Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang didampingi P2TP2A	Kab/Kota	30 Kasus	291.475	APBD		40 Kasus	320.623
9	- Fasilitasi forum anak	Jumlah kegiatan pengiriman duta anak Provinsi ke forum anak nasional dan kongres anak nasional	Kab/Kota	18 orang	137.589	APBD		15 orang	151.348
10	- Jambore perlindungan anak tingkat provinsi	Jumlah anak mengikuti pertemuan jambore perlindungan anak	Kab/Kota	1 Jambore	100.000	APBD		1 Jambore	150.000
11	- Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Berhasilnya pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kab/ Kota di Provinsi Bengkulu	Kab/Kota	2 Kab/ Kota	147.092	APBD		2 Kab/ Kota	167.092



	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>1.660.600</b>	<b>APBD</b>			<b>1.716.660</b>
1	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas P3APP&KB	Jumlah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas P3APP&KB	Kab/Kota	1 Dok	100.000	APBD		1 Dok	100.000
2	- Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak	Jumlah dokumen mengenai profil gender dan anak	Kab/Kota	2 dok	160.600	APBD		2 dok	176.660
3	- Peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang ekonomi	Jumlah SDM perempuan yang mengikuti pelatihan bidang ekonomi	Kab/Kota	50 Kelompok	250.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	60 Kelompok	275.000
4	- Pembinaan koperasi perempuan	Jumlah koperasi perempuan yang dibina	Kab/Kota	10 koperasi	250.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	10 koperasi	225.000
5	- Rapat koordinasi teknis forum Gender dan anak Se-Provinsi Bengkulu	Rencana aksi forum data	Kab/Kota	1 Rakor	150.000	APBD		1 Rakor	165.000
6	- pembentukan <i>Focal point</i> Kabupaten dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kab/Kota	Terbentuknya Focal point di 10 Kab/Kota dan meningkatnya kapasitas Pokja PUG	Kab/Kota	3 Kab/Kota	100.000	APBD		2 Kab/Kota	60.000
7	- Pembekalan Kader BKL/BKB/BKR	Peningkatan SDM Kader BKL/BKB/BKR	Kab/Kota	30 Kelompok	150.000	APBD		30 Kelompok	165.000
8	- Jambore ketahanan Keluarga , perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif	Jumlah Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif	Kab/Kota	1 Jambore	250.000	APBD		1 Jambore	275.000
9	- Peringatan Hari Besar Perempuan dan Anak	Hari Kartini, Hari Ibu dan hari anak nasional	Kab/Kota	3 event	250.000	APBD		3 event	275.000
	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan</b>				<b>2.175.047</b>	<b>APBD</b>			<b>2.597.552</b>
1	- Peningkatan <i>Home Industry</i> Perempuan Berbasis ekonomi kreatif	Jumlah <i>Home Industry</i> Perempuan yang dibina dan dikembangkan	Kab/Kota	15 home industry	300.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	15 home industry	330.000



2	- Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha dalam Peningkatan Produktifitas ekonomi Perempuan (PPEP)	Jumlah Kelompok Usaha yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk PPEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan) dalam suatu wilayah	Kab/Kota	10 Kelompok	150.000	APBD		15 Kelompok	215.000
3	- Pembinaan dan pelatihan kelompok ekonomi Industry Kreatif perempuan berbasis potensi lokal	Jumlah PKL ekonomi perempuan berbasis potensi lokal	Kab/Kota	150 Pedagang	300.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	150 Pedagang	330.000
4	- Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Pemberdayaan Nelayan di Kampung Pesisir	Jumlah Keluarga yang di Bina	Kab/Kota	2Kab/Kota	100.000	APBD		2Kab/Kota	110.000
5	- Bimbingan kemasan Prroduk Olahan Industri Rumah Bagi perempuan sebagai kepala Rumah Tangga	Jumlah Kelompok Ibu Rumah Tangga Yang di Bina	Kab/Kota	25 KK	250.000	APBD		33 KK	275.000
6	- Pendidikan dan Pelatihan bagi ibu Rumah tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera melalui keterampilan Industri Kreatif	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan	Kab/Kota	200 Orang	209.574	APBD		220 Orang	280.531
7	- Pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan perlindungan PPA dari tindak kekerasan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan kekerasan	Kab/Kota	1 Kegiatan	265.473	APBD		1 Kegiatan	292.020
8	- Pembentukan satgas perlindungan anak (Pembentukan Kader/Aktifis Pengembangan Penyelenggara PATBM)	Jumlah desa/ Kel koordinasi antar SKPD, lembaga layanan, pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan adanya bantuan stimulan	Kab/Kota	2 kab/kota	150.000	APBD		2 kab/kota	165.000
9	- Pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak di lokasi wisata	Jumlah satgas perlindungan perempuan dan anak di lokasi wisata	Kab/Kota	2 Lokasi wisata	250.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas 5	3 Lokasi wisata	275.000
10	- Pameran Hasil karya Perempuan di bidang Pembangunan	Jumlah Event ruang Aspirasi Perempuan dan Anak	Kab/Kota	1 Event	50.000	APBD		2 Event	160.000
11	- Pengembangan Sistem Permodalan alternatif bagi kelompok Usaha Perempuan dengan Lembaga Keuangan	Jumlah Lembaga Keuangan yang memberikan Bantuan modal kepada kelompok Usaha perempuan	Kab/Kota	15 Kelompok	150.000	APBD	Kegiatan mendukung prioritas I	15 Kelompok	165.000



## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2018 disusun secara sistematis dan partisipatif sebagai wujud dukungan secara administrasi publik yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan secara profesional, efisien dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan proses yang berkelanjutan dan simultan, yang artinya perencanaan ini memerlukan pengkajian, analisis dan perhitungan yang berkelanjutan dan sinergis dengan perkembangan yang ada.

Pencapaian semua visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dana yang memadai agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminta dukungan penuh kepada Gubernur Bengkulu melalui BAPPEDA Provinsi Bengkulu untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu ini
- b. Mengajukan secara formal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu kepada DPRD Provinsi Bengkulu
- c. Melakukan komunikasi dan sosialisasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu kepada seluruh



jajaran yang ada di bawah agar pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran dapat dilakukan secara simultan dan baik

- d. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berkewajiban untuk melaksanakan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan
- e. Setiap usulan dan Rencana Kerja dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan, apabila anggaran yang tersedia nantinya tidak memenuhi pagu yang dibutuhkan, maka akan dilaksanakan kegiatan/program berdasarkan skala prioritas.

Saran dan tindak lanjut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu terkait pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun 2017 ini, antara lain:

- a. Diperlukan perhatian pada peningkatan kapasitas aparatur/ SDM dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan maupun layanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu.
- b. Diperlukan perhatian khusus pada pengumpulan dan penyediaan data sebagai pendukung dalam pengambilan kebijakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian





Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan rutin dan pembangunan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan akan lebih akuntabel dan terukur.

Bengkulu, April 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI BENGKULU**

**Hj. FORITHA RAMADHANI WATI, SE., M.Si**  
Pembina TK.I  
NIP. 19691128 199303 2 006



